



**BUPATI CIANJUR**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 39 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cianjur telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama dipandang perlu untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 09 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 02 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Utama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, setelah angka 4 ditambah angka baru, yakni angka 5, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) IKU Pemerintah Daerah merupakan acuan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan organisasi perangkat daerah untuk:
- a. menyusun rencana strategis OPD;
  - b. menyusun rencana kinerja tahunan;
  - c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - d. melakukan evaluasi capaian kinerja; dan
  - e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Uraian IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 3 dan 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3A**

Dalam rangka mengefektifkan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Daerah diberikan tugas untuk:

- a. melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap OPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati ini dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

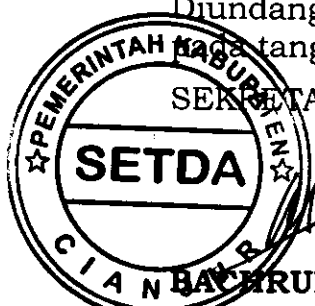
Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Oktober 2012  
BUPATI CIANJUR,

ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



**BACHRUDDIN ALI**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : 39 TAHUN 2012  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
<b>MISI : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu</b>			
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	1	Rasio Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal maupun non formal
		2	Jumlah daya tampung pendidikan dini (ruang kelas )
		3	Rasio jumlah sekolah SD dan SMP Terhadap usia sekolah SD dan SMP (7 -15 tahun ) baik formal maupun non formal
		4	Jumlah daya tampung SD/SMP
		5	Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun )baik formal maupun non formal
		6	Jumlah daya tampung SMA/SMK
		7	Persentase jalan desa mantap yang di bangun menuju sarana pendidikan
		8	Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
		9	Angka kelulusan SD/MI
		10	Angka kelulusan SMP/MTs
		11	Angka kelulusan SMA/MA/SMK
12	Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1.3	Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang	12	Persentase siswa yang naik kelas	%
		13	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	%
		14	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	%
		15	Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/SMK	%
1.4	Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan	16	Persentase siswa yang melanjutkan	%
		17	Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI	%
		18	Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs	%
1.5	Meningkatnya kelulusan SMK yang tereserap dunia kerja	19	Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK	%
		20	Persentase jumlah lulusan SMK yang tereserap di dunia kerja pada tahun kelulusan	%
1.6	Tertanamnya nilai-nilai ahlakul karimah ke dalam peserta didik	21	Sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter	%
1.7	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan	22	Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki	Rasio
1.8	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalamantisipasi dan penanggulangan bencana	23	Sekolah yang melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana	sekolah
1.9	Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal	24	Persentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah	%
1.10	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelola dan pelaksanaan pendidikan	25	Persentase sekolah yang memiliki komite sekolah	%
1.11	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan	26	Kendaraan perpustakaan keliling	unit

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
<b>MISI 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu</b>			
2.1	Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat	1	Persentase rumah tinggal bersanitasi
		2	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas
		3	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
		4	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
		5	Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan
2.2	Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan kesehatan	6	Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik
		7	Rasio rumah sakit persatuan penduduk
		8	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
		9	Prevalensi gizi buruk
2.3	Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat	10	Cakupan desa/kelurahan <i>universal child immunization</i>
		11	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
		12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
2.4	Peningkatan pembiayaan kesehatan masyarakat	11	ketersediaan kesehatan masyarakat
		12	%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN
3.6	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	25	Jumlah peningkatan angka investasi	triliun
		26	Peningkatan transmigrasi swakarsa	KK
3.7	Terwujudnya iklim investasi yang sehat	27	Lama proses perijinan (rata-rata )	hari
		28	Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha	Buah
		29	Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal di bandingkan penduduk usia kerja	%
		30	Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek	orang
3.8	Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan	31	Cakupan bina kelompok nelayan	%
		32	Produksi perikanan kelompok nelayan	%
		33	Pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan	Kec
3.9	Memuatnya inflementasi rencana tata ruang daerah ruang untuk pemanfaatan pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur	34	Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diperdakan	Kawasan
		35	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten	desa
		36	Ketaatan terhadap RT RW	%
3.10	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang behasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	37	Persentase berkurangnya penambang liar	%
		38	Porsentase air sesuai dengan perijinan yang berlaku	%
		39	Porsentase jumlah rencana usaha / kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dokumen LH (amdal, UKL, UPL, SPPJ)	%



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
3.2	Meningkatnya ketersediaan mekanisme aksesibilitas pangan produksi pangan distribusi dan serta dan	8 Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak
3.3	Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan	9 Ketersediaan pangan utama	%
3.4	Meningkatnya aksesibilitas KUMKIN terhadap modal, teknologi dan pasar	10 Jumlah objek dan daya wisata pertahun	Buah
3.5	Tewujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing di dukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna	11 Jumlah kunjungan wisata	orang
		12 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	buah
		13 Porcentaje infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah	%
		14 Kondisi infrastruktur jalan (trotoar)	km
		15 Komisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan	m/tahun
		16 Porcentaje koperasi aktif	%
		17 Jumlah UKM non BPR/LKM UKAM	buah
		18 Jumlah BPR/LKM Aktif	Buah
		19 Porcentaje usaha mikro dan kecil	%
		20 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%
		21 Cakupan bina kelompok pedagang	%
		22 Kontribusi sektor industri lembaga PDRB	%
		23 Cakupan bina kelompok pengrajin	%
		24 Jumlah produk unggulan yang berstandar mutu	Buah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
<b>MISI 3 :Meningkatkan daya beli masyarakat</b>				
3.1 Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk industri pertanian yang berdaya saing		1 Produktifitas padi atau bahan, bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	%	
		2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	
		3 Nilai produk dan produktifitas perjenis produk pertanian pertahun	- Padi	Ton
			- Palawija	Ton
			- sayuran	Ton
			- buah-buahan	Ton
		4 Nilai produk dan produktivitas perjenis produk pertahun	- produk perkebunan	Ton
			- produktivitas tanaman perkebunan	Ton
			- produk HHBK	Ton
			- produksi perikanan budidaya	Ton
			- produksi daging	Ton
			- produksi telur	Ton
		5 Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya	- produksi susu	Liter
			- pertanian	Kelompok
			- perikanan /peternakan	Kelompok
			- kehutanan / perkebunan	Kelompok
		6 Persentase sawah terairi		
7 Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis		%		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN
2.5	Terjaininya ketersediaan dan keterjangkauan obat	13	Ketersediaan obat , terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin	%
2.6	Terperuhinya permintaan pelayanan KB kesehatan reproduksi yang berkualitas	14	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Anak
		15	Rasio akseptor	Rasio
2.7	Meningkatkan kualitas dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	17	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	%
		18	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%
		19	Penanganan korban trafficking	Orang
		20	Rasio KDRT	Kali
2.8	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak	21	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan	%
		22	Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina anak dari keluarga di kecamatan	orang
		23	Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	kali

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
3.11	Berkenbangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal	40 RTH persatuan luas wilayah perkotaan (rata-rata )	%
		41 Persentase penanganan sampah	%
		42 Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	%
		43 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung	%
		44 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan	dokumen
		45 Ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan	%
		46 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan	Ruas jalan
47 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan	Dokumen		
48 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis	%		
49 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%		
50 Luas kawasan kumuh	%		
51 Rumah layak huni	%		
52 Tersedianya database jalan lingkungan dan jalan setapak	Kec		
53 Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintah	%		
54 Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan	%		
55 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informatika	%		
56 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan	%		
57 Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan	%		
58 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas	%		
59 Efektivitas pelayanan angkutan	%		
60 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas	%		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			SATUAN
		61	Persentase tingkat upaya kelaikan lalu lintas		%
		62	Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas		%
		63	Penataan pemukiman muslim dan non muslim		ha
		64	Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial		m <sup>2</sup>
3.12	Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan	65	Berkurangnya lahan krisis		ha
		66	Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan		%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
<b>MISI 4 :Memantapkanpelaksanaanreformasibirokrasi</b>			
4.1	Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur,tangguh dan cerdas,terampil,mandiri memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras,produktif,inovatif,disiplin,berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia	<p>1 Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS</p> <p>2 Porsentase jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat pemimpinan</p> <p>3 Porsentase pegawai yang mengikuti diklat teknis</p> <p>4 Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik</p>	Kasus    %
4.2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien,pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal	<p>5 Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu</p> <p>6 Peningkatan pernyataan opini BPK</p> <p>7 Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah</p> <p>8 Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah</p> <p>9 Sertifikasi aset ( tanah ) milik daerah</p> <p>10 Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah</p>	31-jul WTH % % % milyar Rp

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
4.3	Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	11 Tersedianya dokumen RPJPD yang telah di tetapkan dengan PERDA	
		12 Tersedianya dokume RPJMD yang telah di tetapkan dengan PERDA	ada/tidak
		13 Tersedianya dokumen RKKPD yang telah di tetapkan dengan Perkada	Ada/tidak
		14 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKKPD	Ada/tidak
		16 Ketersedian pengaturan pembentukan OPD hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat	%
		17 Kepemilikan KTP	%
		18 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Rasio
		19 Kepemilikan kartu keluarga	%
		20 Aspirasi masyarakat yang di rekomendasikan ke pemerintah daerah	perda
			perda
	perda		
21	Porsentase lembaga ekonomi pedesaan yang berkembang	%	
22	Porsentase pemanfaatan teknologi tepat guna	%	
23	Ketersediaan propil desa yang valid	Desa/kel	
24	Kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang otonomi daerah	Dokumen	
25	Porsentase jumlah rukun tetangga ( RT) kreatif	%	
26	Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	OPD	
27	Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip	Unit	
28	Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip	Unit	
29	Tingkat penyelesaian pelanggaran K-3	Kasus	
4.4	Terwujudnya penegakkan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat pelaksanaan dalam penyelenggaraan ketentraman ,keteriban dan keamanan yang kondusif	30 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
4.5	Terwujudnya sinergi antar lembaga dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi	31 Cakupan OPD yang dapat mengakses jaringan informasi	%
		32 Jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi	desa
		33 Ketersediaan database untuk analisis perencanaan pembangunan	%
		34 Integrasi sistem informasi yang ada di POD ke dalam (SIG) Kabupaten Cianjur	OPD
		35 Porcentaje cakupan ketersediaan media distribusi informasi	%
		36 Pengkajian dan pembangunan sub Domain website daerah	%
		37 Porcentaje cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi	%
		38 Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi	%
		39 Jumlah kerja sama dibidang HAKI yang dilegislati	%
<b>MSI 5 : Aktualisasinilai-nilaiAkhlaKakuKartimahdalamkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara</b>			
5.1	Terwujudnya pemahaman meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah	1 Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD	Temuan
		2 Menurunnya angka perceraian	kasus
		3 Menurunnya jumlah pelanggaran perda	kec
		4 Jumlah penerimaan zakat inpag sodagoh	Rp
		5 Porcentaje partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada	%
5.2	Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	6 Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah	Ada/tidak
		7 Cakupan petigas linmas	kec
		8 Rasio personil linmas dibandingkan jumlah penduduk	%